

## A. Buku

- Hartini, Rahayu, 2017, *BUMN Persero Konsep Keuangan Negara dan Hukum Kepailitan di Indonesia*, Setara Press, Jawa Timur.
- HR., Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, Jakarta.
- HR., Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marzuki, Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Martosoeignjo, R. Sri Soemantri Martosoeignjo, M. Hadjon, Philipus, *et al.*, 2019, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesia Administrative Law*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ridwan, Juniarso, Sodik Sudrajat, Achmad, 2009, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesatu, Nuansa Cendekia, Bandung.
- Syafrudin, Ateng, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, Jurnal Pro Justisia, Edisi IV, Bandung.
- Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.
- Zulmawan, Wawan, 2020, *Best Value for Money Pengadaan Barang/Jasa BUMN*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

## B. Artikel Jurnal

- Arifin Mochtar, Zainal, *Perihal Menata Regulasi*, Kumpulan Makalah Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi Kota Yogyakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm. 539.
- Insa Ansari, Muhammad, *Penugasan Pemerintah pada Badan usaha Milik Negara Sektor Ketenagalistrikan Dalam Perspektif Hukum Korporasi*, Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Volume 4, Nomor 3, 2017, hlm. 555-561.
- M. Hadjon, Philipus, *Jurnal Yuridika, Tentang Wewenang*, dalam <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/5769/3691>, Volume 7, No. 5-6.

### C. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Kurniawan, Luthfi, 2019, Analisis Yuridis Kontrak Pemerintah Dalam Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan Dengan Skema Engineering Procurement and Construction (EPC) Dengan Deferred Payment Dan Build, Maintain, And Transfer (BMT), Study Kasus Kontrak Pembangunan Jaringan Transmisi 500KV PT PLN (Persero) di Wilayah Sumatera, Prodi S2 Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Rakhman Dira, Andi, 2019, Prinsip Efektif dan Prinsip Efisien dalam Penggabungan Pekerjaan *Engineering Procurement and Construction* (EPC) dan Operational & Maintenance (O&M) Dalam Kontrak Konstruksi Pengadaan Pusat Listrik di PT PLN (Persero), Prodi S2 Magister Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

### D. Internet

Arif Gunawan, *Sederhanakan Aturan, Pemerintah Terbitkan Juknis UU Jasa Konstruksi*, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200710/45/1264456/sederhanakan-aturan-pemerintah-terbitkan-juknis-uu-jasa-konstruksi>.

CNN Indonesia, *Pembangkit Listrik Proyek 35000MW Baru Beroperasi 10%*, dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi>.

IDN Financial, *DIRUT PLN: Program Listrik 35000MW Baru Terealisasi 19%*, dalam <https://www.idnfinancials.com/id/news/31732/pln-program-realized>.

Indonesia Power, *Sekilas Indonesia Power*, dalam <https://www.indonesiapower.co.id/id/profil/Pages/>.

Munarsih Sahana, *Presiden Jokowi Luncurkan Program 35000MW Listrik Untuk Indonesia*, dalam <https://www.voaindonesia.com>.

Rahmat Setiawan, *Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Tentang Proyek Listrik 35.000MW*, dalam <https://www.kompasiana.com/cakmat>.

Suci Sedyta Utami, Lima Besar Hutang Pemerintah Kepada BUMN, <https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNnX3E2k-lima-besar-utang-pemerintah-ke-bumn>.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN KEMENKUMHAM RI, *Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Ketenagalistrikan*, [https://www.bphn.go.id/data/documents/pokja\\_listrik.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pokja_listrik.pdf).

### E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No.2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Diundangkan di Jakarta pada 12 Januari 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018 untuk Penjelasannya.

Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diundangkan di Jakarta pada 17 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 untuk Penjelasannya.

Undang-undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Diundangkan di Jakarta pada 23 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133.

Peraturan Presiden No.14 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No.4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Diundangkan di Jakarta pada 20 Februari 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27.

Peraturan Menteri ESDM No.10 tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Diundangkan di Jakarta pada 23 Januari 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 151.

Peraturan Presiden No.16 tahun 2018 tentang Pegadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diundangkan di Jakarta pada 22 Maret 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Peraturan Pemerintah RI No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Diundangkan di Jakarta pada 30 Mei 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64.

Peraturan Pemerintah RI No.54 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No.29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Diundangkan di Jakarta pada 22 November 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949 untuk Penjelasannya.

Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Diundangkan di Jakarta pada 16 Desember 2019. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1613.

Permen PER-15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Diundangkan di Jakarta pada 25 September 2012.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor. 05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. Diundangkan di Jakarta pada 3 September 2008.

Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2020, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Diundangkan di Jakarta pada 23 April 2020.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**DISHARMONI REGULASI DI SEKTOR KONSTRUKSI DENGAN REGULASI DI SEKTOR  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR  
KETENAGALISTRIKAN**

RIKA MALENI, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

Universitas Gadjah Mada, 2021 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

**F. Surat Edaran Menteri**

Surat Edaran Menteri BUMN No.SE-03/MBU.S/2009 tanggal 15 Desember 2009 perihal sinergi antar sesama BUMN dan/atau dengan anak-anak perusahaanya.